IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh:

Elpi Lutpiani

Abstrak

Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy) pada masa revolusi (1945 – 1950). Setelah itu Demokrasi Liberal pada masa Orde Lama (1950 - 1959). Kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin yang juga pada masa Orde Lama (1959 – 1966). Setelah demokrasi terpimpin beralih lagi Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (1966 – 1998). Pada Orde Reformasi (1998 – sekarang), demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Reformasi.

Keyword: Implementasi Demokrasi, Indonesia

Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Negara dikatakan suatu organisasi karena di dalamnya terdapat struktur contohnya presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri - menternya. Terbentuknya suatu negara harus mempunyai tiga syarat utama yaitu wilayah, masyarakat, dan pemerintah. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahan tersendiri. Bentuk-bentuk pemerintahan itu diantaranya Oligarki, Anarki, Moboraksi, Diktator, dan Demokrasi.

Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan dibatasi atau bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat dan keputusan hukum tertinggi ada pada tangan segelintir orang tersebut.

Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas.

Moboraksi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang sama.

Diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak (otoriter), dan Demokrasi adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Dari beberapa bentuk pemerintahan ini,

demokrasi yang paling umum digunakan dalam suatu sistem pemerintahan termasuk Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasi, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu. Nah pada kesempatan ini, kami akan menyusun sebuah karya tulis tentang Implementasi Demokrasi di Indonesia.

Kasus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kasus masalah yang akan dibahas di dalam makalah ini adalah sebagai berikut: Apa yang dimaksud konsep dasar demokrasi ? Bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahli ? Apa sajakah ciri-ciri demokrasi ? Apa saja jenis-jenis dan prinsip demokrasi di Indonesia ? Bagaimana perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia ?

Tinjauan Pustaka

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa. a) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer; b) Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat; c) Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil.

Pembahasan

Konsep Dasar Demokrasi

Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan "dari, oleh, dan untuk rakyat" maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintah dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; Coppedge dan Reinicke 1993).

Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elite yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat jauh lebih banyak dan yang mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian "demokrasi populistik" hendak tetap dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep "poliarki" sebagai pengganti dari konsep "demokrasi populistik" tersebut. Poliarki dinilai lebih realistis untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh "banyak rakyat" bukan oleh "semua rakyat", oleh "banyak orang" bukan oleh "semua orang."

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "Demokratia" yang dibagi dalam dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

Berikut ini pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:

1. Aristoteles

Menurut Aristoteles Demokrasi adalah suatu negara suatu kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya.

2. Abraham Lincoln

Menurut Abraham Lincoln Democracy is government of the people, by the people, and for the people (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

3. Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan negara.

4. Sidney Hook

Menurut Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

5. Mohammad Hatta

Menurut Mohammad Hatta Demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.

Ciri-Ciri Demokrasi

Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat

a. Demokrasi langsung (direct democracy)

Yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan.

b. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (representative democracy)

Yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen).

c. Demokrasi sistem referendum

Yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum.

Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut:

a. Demokrasi liberal

Yaitu paham demokrasi dengan menitikberatkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan.

b. Demokrasi rakyat atau proletariat (komunis)

Yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal negara ini) sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan.

c. Demokrasi pancasila

Merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik

saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dilihat dari perkembangan paham

- a. Demokrasi klasik : Yaitu paham demokrasi yang menitikberatkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara
- b. Demokrasi modern : Yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat

- a. Demokrasi liberal : Dalam demokrasi ini pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tetap.
- b. Demokrasi terpimpin : Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan.
- c. Demokrasi sosial : Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan egalitarianisme (paham persamaan) bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
- d. Demokrasi partisipasi : Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin.
- e. Demokrasi konstitusional : Demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya umum.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip budaya demokrasi

- a. Kebebasan : Adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun.
 - b. Persamaan : Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik.
 - c. Solidaritas : Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama.
-

- d. Toleransi : Adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang (menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.
- e. Menghormati kejujuran : Kejujuran berarti kesediaan ataketerbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak.
- f. Menghormati penalaran : Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antarwarga masyarakat demokratis.
- g. Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti. Seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara.

Prinsip – prinsip demokrasi yang bersifat universal

- a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
- d. Pengormatan terhadap supremasi hukum.

Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law) antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
- b. Kedudukan yang sama dalam hukum.
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang.

Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis

Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Berikut ini merupakan ciri-ciri pemerintahan Demokrasi:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga

perwakilan rakyat.

Landasan-landasan Demokrasi Indonesia

1. Pembukaan UUD 1945

- a. Alinea pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
- b. Alinea kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- c. Alinea ketiga yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas.
- d. Alinea keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.

2. Batang Tubuh UUD 1945

- a. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”.
- b. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.
- e. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di dalam hukum.
- f. Pasal 28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang. Gerakan demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh massa rakyat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan berbicara dan berserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokratisasi tersebut meskipun peraturan perundangan yang berlaku bias digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja, umpamanya, melarang pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan Golongan Karya yang hanya mengakui dua partai politik dan satu Golongan Karya. Tentu saja pemerintah tidak mau

mengambil resiko bertentangan dengan rakyat sehingga pemerintah membiarkan demokratisasi bergerak sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Langkah selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia. Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dilakukan bersamaan dengan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Tidak lama setelah UU Politik dikeluarkan, diterbitkan pula UU Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh daerah-daerah.

Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 juga telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah. Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabupaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” seperti yang disebutkan dalam UU Pemda yang dihasilkan selama masa Orde Baru. DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan gubernur sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.

Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia. Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Demokratisasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerah-daerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk system politik

demokratis yang memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia, demokrasi dibagi dalam beberapa periode berikut:

1. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusioner (1945-1950) Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi

Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya revolusi fisik. Pada awalnya kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UU ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolute pemerintah mengeluarkan:

- a. Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif;
- b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentuksn Partai Politik;
- c. Maklumat Pemerintah tangaal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer .

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Pada masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Akan tetapi, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

- 1) Dominannya partai politik ;
- 2) Landasan sosial ekonomi yang masih lemah ;
- 3) Tidak mempunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1945.

Atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang isinya:

- 1) Bubarkan konstituante
- 2) Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950
- 3) Pembentukan MPRS dan DPAS.

b. Masa Demokrasi Terpimpin

Pengertian	demokrasi	terpimpin	menurut	Tap	MPRS
------------	-----------	-----------	---------	-----	------

No.VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom.Ciri-cirinya adalah:

- 1) Tingginya dominasi presiden
- 2) Terbatasnya peran partai politik
- 3) Berkembangnya pengaruh PKI

Penyimpangan masa demokrasi dipimpin antaara lain:

- 1) Sistem kepartaian menjadi tidak jelas ,dan para pemimpin partai banyak yang dipenjarakan;
- 2) Peranan parlemen lemah,bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR ;
- 3) Jaminan HAM lemah;
- 4) Terbatasnya peran pers;
- 5) Kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC (blok timur) yang memicu terjadinya peristiwa pemberontakan G 30 S PKI .

3. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru 1966-1998

Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 maret 1996.Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen .Awal Orde Baru member harapan baru kepada rakyat pemnbangunan di segala bidang melalui Pelita I,II,III,IV,V dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umun tahun 1971,1977,1782 ,1987,1992,dan 1997.Meskipun demikian pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alasan:

- a. Tidak adanya rotasi kekuaan eksekutif;
- b. Rekrutmen politik yang tertutup;
- c. Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi ;
- d. Pengakuan HAM yang terbatas;
- e. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

4. Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi 1998- Sekarang

Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan pernbaikan peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan

fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Masa reformasi berusaha membangun kehidupan yang demokratis antara lain dengan:

- a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;
- b. Ketetapan No.VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum;
- c. Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
- d. Tap MPR RI No.XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI;
- e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I,II,III,IV.

Disisi lain ada juga ahli yang berpendapat tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu Menurut Azyumardi Azra (2000: 130-141) Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu:

1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer.

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

2. Periode 1959-1965 (Orde Lama) Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Dan didalam demokrasi terpimpin terdapat ciri-ciri yaitu adanya dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai

suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Misalnya berdasarkan ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selain itu, terjadi penyelewengan dibidang perundang-undangan dimana pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum, dan sebagainya.

3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila.

Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah

4. Periode 1998-sekarang (Reformasi).

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun.

Kesimpulan

Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy) pada masa revolusi (1945 – 1950). Setelah itu Demokrasi Liberal pada masa Orde Lama (1950 - 1959). Kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin yang juga pada masa Orde Lama (1959 – 1966). Setelah demokrasi terpimpin beralih lagi Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (1966 – 1998). Pada Orde Reformasi (1998 – sekarang), demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Reformasi.

Daftar Pustaka

- Al Annas, S. N. N., Indasah, I., Yudhana, A., & Sodik, M. A. (2018). Analysis of Using Basic Material and Process on Organoleptic Result of Tempe Chips in Ngantru Trenggalek. *Indonesian Journal of Nutritional Epidemiology and Reproductive*, 1(1), 46-55.
- Alfian, M. Alfian. (2009) *Demokrasi Pilihlah Aku (Warna-Warni Politik Kita)*. In Trans Publishing, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006) *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012) *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Assihiddiqie, Jimly. (2012) *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ghofar, Abdul. (2009) *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia, Setelah Perubahan Dengan Delapan Negara Maju*. Kencana Perdana Media, Jakarta.
- Harjono. (2009) *Transformasi Reformasi*. Skretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahfud, Moch. (2009) *Konstitusi dan Hukum Dalam Konstroversi Ilmu*, Rajawali Press, Jakarta.
- Manan, Bagir. (2003) *DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. UII Press, Yogyakarta.
- Stong, C.F. (2004) *Konstitusi-Konstitusi Politik dalam Kajian Tentang Sejarah dan BentukBentuk Konstitusi Dunia*. Nuansa dan Nusa Media, Bandung.
- Suharjo, Achmad. (2012) *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulardi. (2012) *Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang.
-